

## **BAB III**

### **IMPLEMENTASI PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2008-2009**

#### **A. Peningkatan mutu**

Peingkatan mutu yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan meliputi pelaksanaan KKG dan K3S. KKG dan K3S sengaja dibedakan karena orientasi dari keduanya berbeda. KKG ditujukan oleh guru-guru agar mampu meningkatkan kinerjanya dalam mendidik siswa, sedangkan K3S berorientasi pada peningkatan kualitas kepala sekolah sehingga kemampuannya dalam melaksanakan manajemen sekolah dapat lebih meningkat.

#### **1. Pelaksanaan KKG (Kelompok Kerja Guru) atau K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah)**

Dalam rangka peningkatan mutu, Dinas Pendidikan Kota Balikpapan melaksanakan program KKG dan K3S untuk mendorong diaktifkannya pertemuan secara periodik. Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), Keberadaan kegiatan KKG pada dasarnya merupakan bagian yang integral dari perwujudan Sistem Pembinaan Profesional, yang didalamnya terdapat serangkaian kegiatan peningkatan mutu pendidikan, kemampuan profesional guru, mutu proses belajar mengajar serta hasil belajar dengan memanfaatkan segala sumber

daya dan potensi yang dimiliki oleh sekolah, tenaga kependidikan dan masyarakat sekitarnya.

**Tabel 3.1**

**Kepengurusan KKG (kelompok kerja guru) atau K3S (kelompok kerja kepala sekolah) Kota Balikpapan tahun 2008/2009**

No	Nama Kepengurusan	Wilayah Kerja	Jumlah Kepengurusan dan Jabatan	Guru Pemandu Bidang Studi
1	KKG/K3S SD/MI	5 Kecamatan	15 orang ketua 15 orang sekretaris 15 orang bendahara 75 orang anggota	PAI=15 orang Ppkn=15 orang B.indo=15 orang MTK=15 orang IPA=15 orang IPS=15 orang PENJAS=15 orang KTK=15 orang MULOK=15 orang

Sumber Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

Depdikbud dalam bukunya Pedoman Pengelolaan Gugus Sekolah menyatakan KKG berfungsi: (1) menyusun kegiatan KKG satu tahun dibimbing pengawas, Tutor dan guru pemandu; (2) Menampung dan memecahkan masalah yang dihadapi guru dalam kegiatan belajar-mengajar melalui pertemuan, diskusi, contoh mengajar, demonstrasi penggunaan dan pembuatan alat peraga. Sedangkan tujuan dari KKG adalah membantu meningkatkan kemampuan guru sebagai

profesional dalam melaksanakan tugasnya yaitu keberhasilan kegiatan belajar-mengajar

program kegiatan KKG dan K3S dilaksanakan 3 bulan 1x diadakan tiap hari Sabtu. KKG para pesertanya guru kelas sedangkan K3S para pesertanya seluruh kepala sekolah SD. Setiap guru pemandu sudah diatur di Provinsi dahulu. program kegiatan KKG dilaksanakan dengan membentuk Gugus Sekolah yang ada di setiap Kecamatan. Gugus Sekolah terdiri dari satu SD Inti dan beberapa SD lain yang berada di sekitarnya sebagai SD Imbas. Secara spesifik, tiap Gugus Sekolah perlu menyusun rencana kegiatan KKG dengan berpedoman pada petunjuk penyelenggaraan Gugus Sekolah yang dikeluarkan pemerintah. Sebagai titik kulminasi dalam kegiatan KKG diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru, baik kompetensi personal, professional, dan kemasyarakatan.

Penelitian ini dilaksanakan di Gugus Inti I Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan pada tahun pelajaran 2008/2009. Peneliti menentukan lokasi tersebut dengan pertimbangan Gugus Inti I merupakan gugus yang berada di jalur perkotaan namun pelaksanaan KKG terkesan belum optimal. Terlebih lagi Gugus Inti I merupakan sentral kegiatan dan aktivitas guru-guru se-Kota Balikpapan, khususnya di SD 001 Balikpapan Selatan.

Dinamis tidaknya pelaksanaan KKG sudah barang tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Satu di antaranya adalah interaksi yang terjadi dalam pelaksanaan KKG baik interaksi antara guru dengan guru peserta KKG, tutor dengan guru

dan tutor dengan tutor. Dalam konteks yang lebih aplikatif, tutor berperan sebagai "guru" sedangkan guru peserta KKG berperan sebagai "siswa".

Berdasarkan informasi dan data yang terkumpul diperoleh simpulan bahwa pelaksanaan Kelompok Kerja Guru (KKG) di Gugus Inti I Cabang Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, belum dilaksanakan secara efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Dik.Das program ini baru berjalan 60 % adapun kendalanya karena keterbatasan dana<sup>24</sup>

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bu Farida, yang menyatakan bahwa:

“Untuk meningkatkan mutu maka kami melaksanakan KKG (Kelompok Kerja Guru) atau KKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah). Adanya keterbatasan dana menjadi kendala kami dalam menerapkan program tersebut. Tanpa adanya dukungan dana yang memadai maka kami tidak dapat melaksanakan keseluruhan program dengan baik. Beberapa hal kami ‘pangkas’ karena dana yang ada tidak memadai untuk pelaksanaan kegiatan. Namun syukurnya program cukup terlaksana dengan baik dan tidak mengurangi dari esensi program tersebut”<sup>25</sup>

Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) berorientasi kepada perbaikan manajemen atau pengelolaan sekolah dan peningkatan serta pengayaan kiat-kiat kepemimpinan. Sebab pada dasarnya kualitas pendidikan pada sebuah sekolah tergantung pula pada warna manajemen dan kepemimpinan Kepala Sekolah. Dengan demikian pada dasarnya KKG dan K3S semua kegiatannya terpusat

---

<sup>24</sup>24 Wawancara dengan Dra.Hj. Farida Ibrahim, Kasi DIKDAS Kota Balikpapan, tanggal 15 juni 2008.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Dra.Hj. Farida Ibrahim, Kasi Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Dasar

kepada upaya peningkatan kualitas profesi guru yang diharapkan akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan.

Para peserta (kepala sekolah dan pengawas) diharapkan mampu:

1. meningkatkan peran kepala sekolah dan pengawas dalam memimpin dan membina profesional bagi para guru
2. meningkatkan program kegiatan Kepala Sekolah (KS) atau Pengawas Sekolah (PS) dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

Kepala Sekolah sebagai Manager mempunyai tugas yaitu:

1. menyusun program
2. menyusun personal dalam organisasi sekolah
3. menggerakkan staf, guru, dan karyawan
4. mengoptimalkan sumber daya sekolah

**Table 3.2**

**Kepengurusan MKKS (Manajemen Kerja Kepala Sekolah) SMP/MTS Kota  
Balikpapan tahun 2008/2009**

No	Nama Kepengurusan	Wilayah Kerja	Jumlah Kepengurusan dan Jabatan	Guru Pemandu Bidang Studi
1	MKKS SMP/MTs	5 Kecamatan	15 orang ketua 15 orang sekretaris 15 orang bendahara 75 orang anggota	PAI = 2 orang Ppkn = 5 orang B.indo = 5 orang B.ingg = 5 orang MTK = 4 orang Fisika = 5 orang Kimia = 3 orang Biologi = 5 orang Ekonomi = 4 orang Sejarah = 3 orang Sosiologi = 2 orang PENJAS = 5 orang KIK = 5 orang

- d. Pembinaan kepada guru
- e. Peningkatan partisipasi orang tua dan masyarakat
- f. Cara menghadapi masalah dan tantangan

Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) biasanya diselenggarakan di PKG di gugus, atau, bila tidak ada PKG, kegiatan K3S diselenggarakan di ruang kelas pada salah satu sekolah (seringkali dilaksanakan di sekolah inti). Pertemuan K3S biasanya berlangsung 3 bulan 1x diadakan tiap hari Sabtu setelah selesai jam sekolah. Beberapa pola kegiatan telah dilaksanakan di tempat yang berbeda sesuai dengan kondisi setempat. Pertemuan tersebut diorganisasikan dan dipimpin oleh pemandu yang telah mengikuti pelatihan.

Beberapa pola kegiatan telah dilaksanakan di tempat yang berbeda sesuai dengan kondisi setempat. Pertemuan tersebut diorganisasikan dan dipimpin oleh pemandu yang telah mengikuti pelatihan. Pada tahun 2008 maupun 2009 K3S telah dilaksanakan 4 kali pertemuan tiap tahunnya

**Tabel 3.3**  
**Pelaksanaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah**  
**Tahun 2008**

<b>No</b>	<b>Tanggal Pelaksanaan</b>	<b>Tempat Pelaksanaan</b>
1	15 Maret 2008	SDN 002 Balikpapan Selatan
2	14 Juni 2008	SLTP 1 Balikpapan
3	20 September 2008	SDN 004 Balikpapan Timur
4	20 Desember 2008	SLTP 12 Balikpapan

Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

**Tabel 3.4**  
**Pelaksanaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah**  
**Tahun 2009**

<b>No</b>	<b>Tanggal Pelaksanaan</b>	<b>Tempat Pelaksanaan</b>
1	14 Maret 2009	SDN 008 Balikpapan Tengah
2	20 Juni 2009	SLTP 2 Balikpapan
3	19 September 2009	SDN 010 Balikpapan Barat
4	19 Desember 2009	SLTP 1 Balikpapan

Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

Salah satu contoh pelaksanaan pada tanggal 20 September 2008 di SDN 004 Balikpapan Timur terciptanya Suasana pasif memang terasa sekali dalam kegiatan K3S. Proses diskusi yang interaktif nyaris tidak pernah ada. Kegiatan monoton, dari "datang, duduk, dengar, canda, makan dan pulang" agaknya masih menghiasi suasana pertemuan dalam K3S yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Walaupun terkadang muncul pertanyaan dari Kepala Sekolah dalam kegiatan K3S



namun masih sebatas Kepala Sekolah - Kepala Sekolah yang boleh dikategorikan muda, di mana rasa ingin tahu dan semangatnya masih tinggi. Sedangkan kepala Sekolah yang tergolong sudah tua (berusia 45 tahun ke atas) hanya sebagai pendengar yang baik.

Salah satu contoh lainnya pada tanggal 20 Juni 2009 di SLTP 2 Balikpapan adalah masalah kedisiplinan waktu jadwal dimulainya K3S belum dapat dilaksanakan tepat waktu dikarenakan kedatangan para Kepala Sekolah yang tidak pernah serempak atau mendekati bersama, Rata-rata para Kepala Sekolah hadir pukul 11.30 atau setengah jam lebih lambat dari jadwal yang ditetapkan, dan berdasarkan hasil wawancara dengan kasi Pendidikan Dasar (DikDas) program ini belum semuanya terlaksana dan kendalanya adalah keterbatasan dana. Selain itu Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan juga menjelaskan bahwa:

“Sebagai bagian keuangan, saya memang harus mendistribusikan dana sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kadang antar pegawai juga mengadakan diskusi yang berkaitan dengan ketersediaan dana yang ada di instansi. Program yang ada harus disesuaikan dengan dana yang tersedia sehingga kadang membuat bagian atau staf yang akan melaksanakan program mengkaji ulang pelaksanaannya”<sup>26</sup>

### **3. Sosialisasi penggunaan dana (BOS)**

#### **A. Pengertian BOS**

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Biaya pendidikan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan, serta Biaya Pribadi Peserta Didik.

a. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi:

- Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
- Biaya operasional, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
- Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- Bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

- b. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- c. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Dinas Pendidikan Kota Balikpapan melaksanakan sosialisasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diselenggarakan sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan dua kali dalam satu tahun yaitu pada awal semester
- b. Realisasi dana BOS ke sekolah dilaksanakan sesuai dengan data siswa masing-masing sekolah dan setiap tiga bulan satu kali.
- c. Dana BOS di sosialisasikan di 5 kecamatan di Kota Balikpapan dan disetor sekolah dasar mandapat dana BOS tersebut

**Tabel 3.5**  
**Dana BOS Pada Tahun 2008 hingga 2009**

<b>Keterangan</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Dana Per Siswa</b>	<b>Dana Per Siswa</b>
SD	Rp.235.000 ,-	Rp.235.000 ,-
MI/SLTP	Rp.325.000 ,-	Rp.325.000 ,-

Sumber: Data Administrasi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2008

Pelaksanaan Penyaluran dan Pengelolaan Dana BOS Pelaksanan penyaluran dan pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan oleh organisasi pelaksana yang sebut Tim PKPS-BBM serta Sekolah/Madrasah yang memperoleh alokasi dana BOS. Tim PKPS-BBM dibentuk di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

**Tabel 3.6**  
**Pelaksanaan dana BOS**  
**Tahun 2008/2009**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Sekolah</b>	<b>Penerima</b>	<b>Jumlah Permurid</b>
1	Balikpapan Timur	20 Juli 2008	SDN 007	Aulia P	Rp 235.000
2	Balikpapan Selatan	20 Juli 2008	SDN 009	Burhanudin	Rp 235.000
3	Balikpapan Tengah	20 Juli 2008	SDN 012	Ani lestari	Rp 235.000
4	Balikpapan Barat	20 Januari 2009	SLTP 17	Wawan S	Rp 523.000
5	Balikpapan Utara	20 Januari 2009	SLTP 12	Hendra W	Rp 523.000

## **B. Mekanisme Alokasi**

**Pengalokasian dana BOS dilaksanakan sebagai berikut:**

- 1. Tim Manajemen BOS Pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui Tim Manajemen BOS Provinsi, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap provinsi.**
- 2. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Tim Manajemen BOS Pusat membuat alokasi dana BOS tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA Provinsi.**
- 3. Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah.**
- 4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui Surat Keputusan (SK). SK penetapan sekolah yang menerima BOS ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Dewan Pendidikan. SK yang telah ditandatangani dilampiri daftar nama sekolah dan besar dana bantuan yang diterima (Format BOS-02A dan Format BOS-02B). Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perijinan Pemberian Bantuan (SPPR)**

5. Tim Manajemen BOS Kab/Kota mengirimkan SK Alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke Tim Manajemen BOS Provinsi, tembusan ke Bank/Pos penyalur dana dan sekolah penerima BOS<sup>27</sup>.

Dalam menetapkan alokasi dana BOS tiap sekolah perlu dipertimbangkan bahwa dalam satu tahun anggaran terdapat dua periode tahun pelajaran yang berbeda, sehingga perlu acuan sebagai berikut:

- Alokasi BOS untuk periode Januari-Juni 2009 didasarkan pada jumlah siswa tahun pelajaran 2008/2009.
- Alokasi BOS periode Juli-Desember 2009 didasarkan pada data jumlah siswa tahun pelajaran 2009/2010. Oleh karena itu, setiap sekolah diminta agar mengirim data jumlah siswa ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota, segera setelah masa pendaftaran siswa baru tahun 2009 selesai.

Contohnya di SDN 012 Kecamatan Balikpapan Tengah setiap murid mendapatkan dana BOS Rp 117.500 persemester. Jadi dalam setiap tahun siswa mendapatkan Rp 235.000 dari dana BOS tersebut

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan staf bagian Program dan Pelaporan Dinas pendidikan Kota Balikpapan, Bapak Sugeng menyatakan bahwa:

---

<sup>27</sup> Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka

“kami di tahun 2008 meningkatkan jumlah dana yang diberikan kepada siswa. Hal ini dimaksudkan semakin membantu orang tua siswa agar pendidikan dapat merata diperoleh anak-anak Indonesia. Dengan pemerataan pendidikan diharapkan kualitas pendidikan dapat meningkat<sup>28</sup>”

Dana BOS yang ada telah diterima masyarakat yang memerlukan. Berikut merupakan respon dari dua orang siswa yang mendapatkan dana BOS:

“saya sangat senang mendapat dana BOS. Orang tua saya yang bekerja sebagai nelayan juga merasa sangat terbantu dengan adanya dana BOS. Kami memang kesulitan sekolah karena Bapak saya seorang nelayan sedangkan ibu saya ibu rumah tangga biasa. Semoga dana BOS terus ada”<sup>29</sup>

“adanya dana BOS ini membuat saya merasa terbantu sekali. Teman-teman saya juga mendapatkannya dan kami merasa sangat senang. Harapan kami dana BOS dapat terus berlangsung sehingga pendidikan kami dapat terbantu”<sup>30</sup>

Dengan harapan melalui sosialisasi penggunaan dana BOS, maka penggunaan dana BOS akan dapat menempati sasaran sehingga para orang tua murid atau siswa akan benar-benar merasa dapat terlayani dan pada akhirnya prasarana program wajib belajar 9 tahun kan dapat tercapai.

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Drs. Sugeng Suyanto Kasub Bagian Program dan Pelaporan, Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, tanggal 17 Juni 2008

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ani Lestari siswi SDN 012 kecamatan Balikpapan Tengah, tanggal 20 Juni 2008

<sup>30</sup> Wawancara dengan Herman, siswa SDN 012 kecamatan Balikpapan Tengah, tanggal 20 Juni

## **B. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Peningkatan sumber daya manusia menurut Bu Mariani merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Berikut penjelasan dari Bu Mariani:

“kualitas pendidikan dasar tidak akan tercapai tanpa adanya peningkatan sumber daya manusianya. Disini yang akan ditingkatkan adalah kemampuan dari pelaksana kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kegiatannya adalah diklat CAKEP dan, perluasan kesempatan belajar, serta pelatihan atau penataran peningkatan kualitas guru sekolah”<sup>31</sup>.

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia Dinas Pendidikan Kota Balikpapan melaksanakan program yang mengacu pada peningkatan kompetensi guru melalui:

### **1. Diklat CAKEP (Calon Kepala)**

Diklat calon kepala sekolah (CAKEP) bagi kepala sekolah dasar (SD,SLTP) sehingga baik kepala sekolah, mereka yang akan menduduki jabatan fungsional seperti kepala sekolah maupun pengawas harus wajib memenuhi standar kepala sekolah/madrasah yang berlaku nasional serta sertifikat untuk menduduki jabatan tersebut.

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Mariani, S.Sos, Kasubag. Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota



Adapun Standar Kualifikasi dimaksud meliputi :

1) Kualifikasi Umum :

- a. Pendidikan Minimum Sarjana (S-1) atau Diploma IV (dalam draft semula diutamakan S-2).
- b. Berusia setinggi-tingginya 56 tahun saat diangkat sebagai kepala sekolah
- c. Pengalaman mengajar minimal 5 tahun menurut jenjang sekolahnya
- d. Pangkat minimal III/c bagi PNS.

2) Kualifikasi Khusus menyangkut :

- a. Berstatus sebagai guru sesuai jenjang mana akan menjadi kepala sekolah
- b. Mempunyai sertifikat pendidik sebagai guru sesuai jenjangnya
- c. Mempunyai sertifikat kepala sekolah sesuai jenjangnya yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah

Program diklat CAKEP ini telah dilaksanakan 2 kali pada tahun 2008 sekali dan tahun 2009 sekali. Diklat yang dilakukan pada tahun 2008 pesertanya diangkat pada tahun 2009. Tempat Pelaksanaan diklat adalah Kantor Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.

Untuk bisa diangkat sebagai Kepala Sekolah seorang guru yang lulus seleksi harus mengikuti Sertifikasi melalui Diklat Cakep 900 jam yang diakhiri dengan Uji Kompetensi. Jika dinyatakan lulus sebagai Cakep pun masih harus melalui Uji Publik di hadapan beberapa unsur stake-holders dimana sekolah itu berada. Jika uji publik (semacam pemaparan visi dan misi lengkap dengan beberapa perencanaan) ini dapat dilalui banyak yang bersangkutan dapat diangkat

dan ditempatkan di suatu sekolah sebagai kepala sekolah definitif. Sedangkan bagi kepala sekolah yang sedang menjabat, prosesi peningkatan mutu dilakukan dengan Uji Kompetensi

**Tabel 3.7**  
**Jumlah Peserta Diklat CAKEP**  
**tahun 2008/2009**

No	Tahun	Jumlah Peserta
1	2008	80 Orang
2	2009	100 Orang

Program diklat CAKEP telah terelisasi namun hasilnya belum menunjukkan kinerja yang maksimal. Artinya dalam pelaksanaannya terkadang mengalami hambatan dan kurang dapat berjalan dengan baik. Program dikatakan tercapai dengan baik apabila output yang didapat berkualitas, diketahui bahwa meskipun telah mengikuti program tersebut ternyata masih banyak kepala sekolah yang ada belum kredibel.

Sebagai bahan evaluasi program tersebut belum dikatakan sempurna karena pada daerah otonomi masih dipengaruhi oleh faktor serba keterbatasan, baik dari sumber daya manusia maupun dari faktor sarana maupun prasarana

## **2. Perluasan Kesempatan Belajar**

Dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu dan berupaya meningkatkan pelayanan pendidikan berupa peningkatan mutu dan akses dan mutu sekolah dalam bentuk grant yaitu dana pengembangan sekolah/DPS yang dilaksanakan melalui proyek desentralisasi pendidikan dasar.

Melalui program pengembangan sekolah dan desentralisasi pendidikan dasar (DBEP) adalah program pemberian beasiswa kepada anak-anak keluarga miskin.

Tipe anak penerima beasiswa ada tiga yaitu:

- a. Tipe 1 siswa SD/MI dan SLTP/MTs karena alasan kemiskinan.
- b. Tipe 2 yaitu anak putus sekolah/ DO (SD/MI/SLTP/MTs) karena alasan kemiskinan.
- c. Tipe 3 yaitu anak usia SD/MI/SLTP/MTs tetapi tidak/belum sekolah karena miskin<sup>32</sup>

Meningkatkan kualitas pendidikan SDM merupakan tujuan utama dari pembangunan dibidang pendidikan. Kualitas SDM yang semakin baik akan mempunyai pengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat. Program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah di bidang pendidikan bertujuan agar proses pendidikan berjalan dengan baik. Kalau dilihat dari sarana fisik sekolah di Kota Balikpapan sudah cukup terutama pendidikan dasar (SD dan SLTP)

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Dra. Restiti, H. MPd, Kasi Kurikulum DIKDASMEN, tanggal 18 Juni 2008

- Sekolah Negeri sudah menjangkau daerah terpencil
- Jumlah murid sudah tertampung semua

Anak usia 7-12 tahun sudah 98% tertampung, tetapi masih ada yang putus sekolah dan mengulang walaupun tidak beberapa. Untuk menunjang dan mengantisipasi dari hal diatas maka masih sangat diperlukan:

- Meningkatkan manajemen kepala sekolah dan professional bagi guru-gurunya.
- Meningkatkan layanan bagi anak yang kurang beruntung misalnya anak tuna wisma atau mempunyai kelainan untuk melanjutkan ke SLB (Sekolah Luar Biasa)

Program pengembangan sekolah diberikan kepada sekolah berupa grant yang dimanfaatkan untuk:

- Memperbaiki kondisi belajar/fasilitas sekolah
- Meningkatkan mutu proses kegiatan pembelajaran

Langkah yang ditempuh dalam perluasan belajar yaitu:

- a. Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan

Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang telah dilakukan adalah perbaikan sekolah rusak, penyediaan alat peraga, perpustakaan, hingga pengadaan buku pelajaran dalam jumlah besarbesaran. Prasarana yang dibangun pemerintah adalah unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), perpustakaan

## 1. Unit Sekolah Baru

Program USB merupakan kelanjutan dari program pembangunan Unit Gedung Baru (UGB). Meski sebagai program kelanjutan tapi ada beberapa perbedaan. UGB hanya membangun gedung saja. Sedangkan USB tak hanya bangunan tapi juga sarana dan prasarana pendukung seperti pengajar dan tata usaha. Pembangunan USB sudah lengkap meliputi sarana dan prasarana penunjang. Berbeda dengan masa lalu, pembangunan UGB seringkali terjadi hanya tersedia seorang guru untuk satu sekolah. Satu-satunya guru itupun harus merangkap sekaligus sebagai, tenaga tata usaha dan kepala sekolah. Program pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dilakukan di daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan. Suatu daerah dianggap layak dan membutuhkan didasarkan pada kebutuhan obyektif daerah bersangkutan. Lokasi pembangunan USB berada di daerah-daerah terpencil, pedesaan, terisolir dan daerah yang termasuk kantong kemiskinan

## 2. Ruang Kelas Baru

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) merupakan upaya lain yang dilakukan dalam rangka memperluas kesempatan belajar. Mekanisme subsidi dipakai dalam membangun RKB. Subsidi tersebut diberikan kepada sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta yang membutuhkan sesuai dengan kondisi obyektif yang bersangkutan. Dalam pembangunan ruang kelas baru tidak ada perbedaan antara negeri dan swasta

### 3. Perpustakaan Sekolah

Kondisi perpustakaan sekolah umumnya belum memadai, baik ukuran luasnya maupun fasilitasnya. Banyak perpustakaan sekolah yang luasnya sama dengan ruang belajar, tidak memiliki kursi dan meja baca yang layak. Keberadaan perpustakaan sekolah merupakan hal yang mutlak. Sebab di dunia pendidikan, perpustakaan sekolah merupakan jantungnya informasi yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pendidikan. Perpustakaan merupakan sumber belajar yang sangat penting, dan bertugas sebagai media penyampai publikasi kekayaan intelektual dan sarana pendukung kegiatan pendidikan. Untuk meningkatkan jumlah perpustakaan telah dilaksanakan pembangunan ruang perpustakaan bagi SLTP sebanyak 150 ruang di tahun 2008, dan 25 ruang pada tahun 2009.

#### b. Perehapan gedung Sekolah

Kebutuhan akan program rehabilitasi sekolah disebabkan oleh dua faktor utama: buruknya konstruksi awal gedung sekolah dan kurangnya pemeliharaan yang memadai setelah konstruksi. Kondisi sekolah rusak merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi sekolah dasar. Pemerintah berkomitmen tidak boleh lagi ada anak yang kesulitan bersekolah, atau merasa terancam lantaran sekolahnya mau roboh.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan yang bersumber dari APBN dialokasikan untuk daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas

nasional. DAK pendidikan yang mulai hadir sejak tahun 2003, penyalurannya langsung ke rekening sekolah, atau yang selama ini sering dikenal dengan pola hibah (block grant). penggunaan DAK lebih dititikberatkan pada renovasi gedung SD dan perlengkapan mebelair.

Perehaban gedung Sekolah SD dan SLTP baik yang rusak berat maupun yang rusak ringan dari jumlah keseluruhan sudah mencapai 95% yang sudah direhab. Jumlah gedung yang rusak ringan dan berat adalah 135, dan pada tahun 2008 telah diperbaiki sebanyak 88 gedung sedangkan pada tahun 2009 memperbaiki 32 sehingga keseluruhan gedung yang telah diperbaiki mencapai 120 gedung.

c. Pembangunan gedung sekolah baru antara lain:

- 1 unit SLTP tahun 2008
- 1 unit SLB tahun 2008
- 51 SD yang telah direhab tahun 2008 mendapatkan hasil 100%

Kasi Prasarana Dinas Pendidikan Nasional Kota Balikpapan menyatakan bahwa:

“Dinas Pendidikan Kota Balikpapan berkeinginan meningkatkan kualitas pendidikan dasar dengan salah satu cara yaitu perluasan kesempatan belajar. Anak-anak Indonesesia diharapkan dapat mengenyam pendidikan minimal 9 tahun sehingga secara tidak langsung hal itu mewujudkan peningkatan kualitas generasi muda bangsa”<sup>33</sup>.

Prosedur seleksi sekolah penerima pengembangan sekolah. Seleksi sekolah yang akan mendapatkan dana pengembangan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi penentuan peringkat Kecamatan yang termiskin di tingkat Kota.
2. Seleksi penentuan peringkat sekolah ditingkat Kecamatan.
3. Sekolah yang terpilih bersama komite sekolah menyusun RPS dan dibantu oleh fasilitator Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
4. Selanjutnya RPS dianalisis dan direview oleh sekolah bersama komite sekolah dibantu oleh fasilitator MBS yang selanjutnya direview oleh fasilitator kecamatan SD/MI dan oleh MBS. Kota untuk SLTP dan MTS yang selanjutnya disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota, berdasarkan rekomendasi tim MBS dan Dewan Pendidikan.
5. RPS yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kota Balikpapan dikonfirmasi oleh tim teknis pusat untuk dimasukkan dalam daftar SK sekolah penerima selanjutnya sekolah membuka rekening sekolah yang ditanda tangani oleh sekolah dan komite sekolah.
  - a. Mekanisme penyaluran dana antara lain sebagai berikut:
    1. Sekolah membuka rekening yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah dan Ketua Komite.
    2. Proyek pusat mengajukan SPP ke KPKN, KPKN menerbitkan SPM ke BRI cabang khusus.
    3. BRI cabang khusus Kota mentransfer ke BRI unit Kecamatan.
    4. Sekolah mencairkan dana di BRI unit Kecamatan terdekat



### **3. Peningkatan Kualitas Guru**

Peranan guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu guru sebagai agen pembelajaran dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dalam kerangka pembangunan pendidikan. Guru mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan bidang pendidikan, dan oleh karena itu perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menyiratkan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib untuk memiliki syarat tertentu, salah satu di antaranya adalah kompetensi. Syarat kompetensi tersebut ditinjau dari perspektif administratif, ditunjukkan dengan adanya sertifikat. Namun dalam perspektif teknologi pendidikan kompetensi tersebut ditunjukkan secara fungsional, yaitu kemampuannya mengelola kegiatan belajar dan pembelajaran.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa guru yang berkualitas atau yang ber-kualifikasi, adalah yang memenuhi standar pendidik, menguasai materi/isi pelajaran sesuai dengan standar isi, dan menghayati dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses pembelajaran. Untuk itu, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana atau Diploma IV (S-1/D-IV) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.

dengan ijazah dan pemenuhan persyaratan relevansi mengacu pada jenjang pendidikan yang dimiliki dan mata pelajaran yang dibina.

Pendidikan akta mengajar atau sertifikasi bagi guru berlatar belakang non kependidikan. Hal ini terkait dengan masih banyaknya guru yang bertugas di SLTP/MTs baik negeri maupun swasta yang berlatar belakang non kependidikan. Mereka ini perlu memiliki bekal kemampuan mengajar yang diperoleh dari LPTK terdekat. Mengurangi tugas guru yang mismatch. Masih banyak guru, baik SD/MI maupun SLTP/MTs yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Salah satu contoh di SDN 012 kecamatan Balikpapan Tengah secara kualitatif dari 8 tenaga guru di SDN 012 kecamatan Balikpapan Tengah empat diantaranya berpendidikan sarjana (SPd) dan tiga sisanya Diploma II, namun secara kuantitatif keadaan guru masih kurang, masih ada guru bidang studi (agama) merangkap sebagai guru kelas tiga<sup>34</sup>.

Untuk guru SD/MI klarifikasi minimal adalah D II sedangkan untuk guru SLTP/MTs klarifikasi pendidikannya adalah D III. Berikut adalah pernyataan dari Kasi Dikmen:

"kita ketahuai bahwa tidak semua guru SD berlatar belakang pendidikan guru ataupun sarjana pendidikan. Padahal dalam penerapan proses belajar mengajar di sekolah, diperlukan keterampilan dari guru untuk melakukan proses pembelajaran secara benar sehingga guru memerlukan bekal pengetahuan tentang cara mendidik yang baik. Untuk menyetarakan kemampuan guru yang tidak berlatar belakang guru, maka diperlukan penyetaraan dengan menempuh pendidikan akta pengajar"<sup>35</sup>.

Upaya yang dilakukakan melalui: peningkatan kualifikasi minimal D II sudah tercapai sekarang ini minimalnya meningkat menjadi S1 untuk guru

<sup>34</sup> Wawancara dengan Rahmat Syaifullah, Guru SDN 028, tanggal 17 Juni 2008

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bayu Han, S Pd, Kasi Pendidikan Menengah, tanggal 15 Juni 2008

pendidikan dasar tahun 2008 guru yang telah lulus S1 yang tadinya tingkat pendidikannya D II ada 60 guru dan 2009 direncanakan peningkatan kualifikasi guru untuk disuruh kuliah lagi, Untuk tahun 2009 pesertanya diperbanyak lagi dibanding tahun 2008. Dengan diberlakukannya otonomi daerah melalui UU 32 tahun 2004, memberikan ruang gerak bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. Dalam rangka peningkatan pendidikan di daerah yang lebih demokratis, transparan, efisien, dan melibatkan partisipasi masyarakat luas.

#### **Persyaratan Guru Dalam Proses Sertifikasi**

- a. Guru masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional yaitu guru yang mengajar di sekolah umum, kecuali guru Agama. Sertifikasi guru bagi guru Agama dan semua guru yang mengajar di Madrasah dan guru bidang studi umum) diselenggarakan oleh Departemen Agama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Departemen Agama.
- b. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memiliki sertifikat pendidik.
- c. Belum memasuki usia 60 tahun.
- d. Memiliki atau dalam proses pengajuan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

Kualifikasi dan kompetensi guru sangat diperlukan dan sangat berpengaruh dalam pencapaian mutu pendidikan disamping itu kuantitas guru harus segera diatasi secara bertahap. Menyangkut kualifikasi di Kota Balikpapan pendidikan guru standar minimal D II dan sekarang Pemerintah Daerah sudah

membuka peluang bagi guru kuliah lagi untuk mencapai target maksimal S1. Sayangnya calon mahasiswa S1 ini tidak diseleksi berdasarkan pangkat tertinggi dan golongannya dan juga berdasarkan masa kerja. Sehingga penerimaan guru yang kuliah untuk mencapai pendidikan S1 ini terkesan tidak adil dan juga tidak transparan. Berdasarkan hal seperti itu guru-guru SD yang sudah tua, rata-rata golongan IV ada yang masa kerjanya sudah 30 tahun keatas merasa kecewa, dibandingkan dengan yang masih sangat muda diterima. Data yang diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Lama Kerja Guru**

No	Golongan	Rata-rata Lama Kerja
1	I	3 tahun
2	II	16 tahun
3	III	25 tahun
4	IV	39 tahun

Sumber: Data administrasi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

#### **4. Pelatihan dan Penataran**

Melaksanakan berbagai pelatihan dan penataran untuk meningkatkan mutu guru. Adapun bentuk penataran yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan yaitu:

Penyusunan naskah (Workshop/naskah UAS)

Pada dunia pendidikan di Indonesia, penilaian pendidikan adalah proses untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik. Hasil penilaian digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik dan efektivitas proses pembelajaran.

Fokus penilaian pendidikan adalah keberhasilan belajar peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Untuk selanjutnya, yang dimaksud penilaian di sini adalah penilaian pendidikan. Pada tingkat mata pelajaran, kompetensi yang harus dicapai berupa Standar Kompetensi (SK) mata pelajaran yang selanjutnya dijabarkan dalam Kompetensi Dasar (KD). Untuk tingkat satuan pendidikan, kompetensi yang harus dicapai peserta didik adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Salah satu masalah utama dari seorang guru adalah melaksanakan penilaian. Seorang guru yang bermasalah dengan "bagaimana ia menilai siswanya" akan mengundang protes baik dari siswa, orang tua, atau bahkan oleh teman-teman guru yang lain. Di sisi lain, (terkadang) kemampuan guru dalam "teknik penilaian" masih perlu ditingkatkan

Dari tahun ke tahun materi maupun model penilaian (mestinya) telah terjadi perubahan. Bila pada kurikulum-kurikulum sebelumnya, materi penilaian berfokus pada materi bahan ajar sedangkan saat ini, materi penilaian berfokus pada kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh siswa.

Workshop Penulisan Soal bagi Guru SD dan SLTP Balikpapan Tahun 2008/2009 diselenggarakan di LPMP Kota Balikpapan Tanggal 4 s.d 6 Maret 2009. Diklat ini diselenggarakan agar guru sekolah dasar dapat menyusun naskah dalam rangka untuk mempersiapkan ujian akhir sekolah tingkat sekolah dasar. Karena permasalahannya belum semua guru sekolah dasar di Kota Balikpapan dapat menyusun naskah ujian nasional dengan benar. Untuk itu setiap cabang Dinas P dan K Kecamatan (5 Kecamatan) harus mengirimkan guru SD untuk mengikuti Workshop, guru yang dikirim ini belum pernah mengikuti pelatihan dan harus membawa buku paket atau acuan untuk materi UAS. Untuk sekolah dasar materi yang diadakan untuk penulisan Workshop ini adalah: IPA, IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, Penjaskes, KTK, dan Agama Islam.

#### Langkah Langkah Penulisan Soal

Dalam kegiatan menyusun seperangkat tes tulis, baik itu ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, maupun ujian, atau tes yang lain tentu diperlukan langkah-langkah kegiatan. Hal ini dilakukan agar diperoleh seperangkat tes yang baik. Langkah-langkah penyusunan seperangkat tes tulis

- c. Revisi/perbaiki soal (setelah ditelaah secara kualitatif)
- d. Perakitan soal

Sedangkan yang dimaksud dengan perangkat tes tulis disini adalah:

- a. lembar soal,
- b. lembar jawab,
- c. kunci, dan
- d. pedoman penskoran dan penilaian.

**Tabel 3.9**  
**Peserta Workshop Penulisan UAS SD**

No	Mata Pelajaran	Jumlah Peserta	%
1	Bahasa Inggris	17	9,1
2	Matematika	34	18,2
3	IPA	17	9,1
4	PPKN	17	9,1
5	IPS	17	9,1
6	Agama Islam	17	9,1
7	KTK	17	9,1
8	Bahasa Indonesia	34	18,2
9	Penjaskes	17	9,1
<b>Jumlah</b>		<b>187</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

Berdasarkan data diatas banyaknya guru SD yang mengikuti WorkShop penulisan naskah UAS SD sebanyak 187 peserta. Pelaksanaannya selama 3 hari yang diselenggarakan pada tanggal 4 s.d 6 Maret 2009. Sehingga dari pelatihan tersebut guru SD dapat memahami dan menyusun cara penulisan naskah ujian akhir sekolah dasar dan menerapkannya.

### 5. Peningkatan Kuantitas Guru

**Tabel 3.10**  
**Jumlah Guru Tetap**  
**Di Kota Balikpapan Dari Rata-Rata Pendidikan**  
**Tahun 2008/2009**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah Guru	%
1	SD/MI	1.442	75
2	SLTP/ MTs	468	25
<b>Jumlah</b>		1.910	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

Untuk sekolah dasar di Kota Balikpapan dalam setiap sekolah dasar rata-rata kekurangan 2 Orang guru. Kota Balikpapan mempunyai 145 sekolah dasar Negeri berarti kekurangan guru SDN  $2 \times 145 = 290$  guru yang masih sangat dibutuhkan di Kota Balikpapan. Dari guru yang sudah ada maka Kota Balikpapan kekurangan guru.

Kota Balikpapan Data Tahun 2008 Kekurangan guru yaitu:

a. Guru SD/MI kurang 290 orang

b. Guru SLTP/MTs kurang 80 orang



**Tabel 3.11**  
**Kondisi Kualitas Guru Pendidikan Dasar**  
**Di Kota Balikpapan Dari Rata-Rata Pendidikan**  
**Tahun 2008/2009**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah Guru	%
1	SD	-	-
2	SLTP	-	-
3	SLTA Keguruan	127 Orang	8,80
4	SLTA Non Keguruan	64 Orang	4,43
5	D2	800 Orang	55,47
6	D3 Keguruan	130 Orang	9,04
7	D3 Non Keguruan	23 Orang	1,59
8	S1 Keguruan	178 Orang	12,34
9	S1 Non Keguruan	120 Orang	8,32
	Pasca Sarjana	-	-
<b>Jumlah</b>		1.442	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

Berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar sudah terus menerus dilakukan. Upaya pemberdayaan sekolah dalam rangka menyongsong pelaksanaan otonomi atau desentralisasi pendidikan perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Dalam mencapai tujuan tersebut banyak factor yang harus dikaji. Salah satu faktor penting untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar adalah keberadaan guru yang berkualitas dan berkesinambungan yang di masing-masing sekolah.

Rendahnya kualitas dan kuantitas guru sehingga perlu dikembangkan kualitas dan kuantitasnya. Hal ini sangat penting mengingat guru merupakan ujung tombak dalam menentukan keberhasilan pendidikan dan masa depan bangsa. Guru memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Di kelas gurulah yang menjadi subjek yang menciptakan suasana kelas. Meski upaya perbaikan kurikulum dilakukan terus menerus tanpa dukungan guru yang kompeten pada bidangnya maka hasilnya akan kurang bermanfaat karena tidak akan sampai kepada anak didik. Oleh karena itu guru yang berkualitas diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas juga.

**Tabel 3.12**  
**Jumlah Guru Tetap dan Tidak Tetap**  
**Di Kota Balikpapan**  
**Tahun 2008/2009**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah Guru Tetap	%	Jumlah Guru Tidak Tetap	%
1	SD/MI	1.442	75,50	82	53,95
2	SLTP/MTs	468	24,50	70	46,05
<b>Jumlah</b>		<b>1.910</b>	<b>100</b>	<b>152</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

Selain itu kekurangan guru harus diatasi, masalah kekurangan guru bila dilihat secara keseluruhan sebenarnya ada dua kemungkinan yaitu:

- a. Sekolah-sekolah yang benar-benar kekurangan guru
- b. Tidak meratanya distribusi guru artinya kekurangan guru disuatu sekolah tetapi di sekolah lain terdapat kelebihan guru. Untuk mengatasi

kekurangan guru ini cara yang ditempuh adalah dengan memperkerjakan guru bantu dan guru tetap (honorar) yang disebut dengan guru bantu dan guru kontrak yang dibiayai sebagian dari APBD dan sebagian dari Dewan Komite Sekolah atau swadaya masyarakat.

Dalam mengemban profesi guru dengan status tidak tetap dan honorar memiliki tugas yang sama dengan guru yang berstatus PNS maupun guru tetap yayasan. Yang membedakan adalah pendapatan (upah/gaji) yang diterima, yang menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara guru honorar (guru bantu/kontrak) dengan guru yang berstatus PNS.

MENDIKNAS menyatakan bahwa: berdasarkan informasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2006 terdapat lebih kurang 400,000 PNS yang akan pensiun dan sebagian besar adalah guru. Selanjutnya menteri menyatakan bahwa informasi tersebut ditindaklanjuti dengan upaya antisipatif Pemerintah dan PEMDA serta masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan target WAJAR 9 tahun pada tahun 2008. Oleh karena itu pada era otonomi daerah pengadaan PNS menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Depdiknas sejak tahun 2003 membantu pengadaan guru dengan mengangkat guru bantu sejumlah 190.714 orang.

Pengangkatan guru diharapkan dilakukan setiap tahun, sering berkurangnya sejumlah guru baik pensiun, meninggal dunia maupun sebab lain, di samping itu masih seringnya terjadi ketidakseimbangan antara guru bidang studi yang satu dengan yang lain masih kekurangan guru. Hal ini mengandung maksud

bahwa dalam hal pengangkatan guru baik guru tetap maupun guru kontrak perlu disesuaikan dengan peta bidang studi guru yang dibutuhkan.

Berkaitan penuntasan wajib belajar 9 tahun, tahun 2008 dan sehubungan dengan otonomi daerah maka pengangkatan guru menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Pengangkatan guru dapat dilakukan setiap tahun, sehingga kekurangan guru akan tuntas 2010/2011 di Kota Balikpapan.

### **C. Penyediaan Jasa Layanan**

Pendidikan kesetaraan merupakan salah satu dari pendidikan non formal adalah program yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B dan Paket C. Penyetaraan hasil belajar pendidikan kesetaraan diatur oleh Pasal 26 ayat (6) UU Sisdiknas 20/2003: "Pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan".

Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah dan pelengkap pendidikan formal dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat (life long education). Maka pelaksanaan jalur pendidikan nonformal dapat menggantikan pendidikan formal dalam perluasan akses pendidikan dasar dan menengah terutama bagi peserta didik yang tidak berkesempatan mengikuti sekolah formal. Selain itu, pendidikan nonformal juga berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan

pengetahuan, keterampilan fungsional, dan pengembangan sikap serta kepribadian profesional. Dengan demikian, pendidikan kesetaraan dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

## **1. Penyelenggaraan Program Paket A**

Pemerintah daerah menerapkan standar pelayanan penyelenggaraan paket A setara SD.

a. Program paket A setara SD merupakan program kesetaraan yang dilaksanakan di jalur pendidikan luar sekolah. Program paket A setara SD bertujuan untuk membekali warga belajar dengan kemampuan, pengetahuan dan sikap lulusan sekolah dasar.

b. Aspek komponen program:

### **1. Warga belajar.**

Yang berhak mengikuti program paket A adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Tidak bersekolah, diutamakan berusia 7-12 tahun
- Putus sekolah SD/MI yang dibuktikan surat keterangan/raport sekolah asal
- Mengisi formulir pendaftaran yang telah di sediakan.

### **2. Keterangan**

Penyelenggaraan paket A diselenggarakan oleh pelaksana Dinas DIKNAS

adalah melalui SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)

**c. Syarat penyelenggaraan**

1. Memahami program paket A
2. Memiliki pengalaman dalam mengelola pendidikan luar sekolah
3. Memiliki prasarana yang memadai
4. Mampu mengorganisasikan tenaga pendidik yang terlibat dalam proses pembelajaran paket A
5. Memiliki izin penyelenggaraan program paket A dari Kota.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam mendirikan pembelajaran paket A yaitu:

1. Penilik luar sekolah mencari gedung sekolah atau gedung lainnya yang dapat menampung warga belajar.
2. Setelah mendapat gedung terus mengusulkan ke KASI DIKLOSPORA Dinas DIKNAS Kota
3. KASI DIKLOSPORA konsultasi dengan Kepala DIKNAS, kemudian diusulkan kepada Walikota untuk dimanfaatkan sebagai PKBM program paket A.

**d. Tenaga Tutor dan Nara Sumber Teknis**

Dalam menyelenggarakan program paket A harus tersedia tenaga pendidik yaitu tenaga pembimbing dalam proses tutorial pada mata pelajaran yang sesuai dengan kurikulum paket A.

Adapun syarat Tutor dan nara sumber teknis (NST)

- a. Memiliki ijazah SLTA.
- b. Menguasai substansi materi yang akan diajarkan

- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Menguasai teknik pengajaran.
- e. Mampu mengelola pembelajaran sesuai dengan bahan ujian yang akan diajarkan.
- f. Memiliki komitmen terhadap tugas sebagai Tutor.
- g. Khusus untuk NTS, memiliki kecakapan khusus yang dibutuhkan oleh warga belajar.

**e. Sarana Belajar**

Dalam penyelenggaraan program paket A perlu disediakan sarana belajar.

Sarana belajar yang dimaksud adalah:

1. Kurikulum inti dan kurikulum muatan lokal
2. Buku pegangan Tutor
3. Modul pelajaran paket A
4. Buku modul keterampilan
5. Sarana belajar penunjang lainnya yang diperlukan.

**f. Tempat Belajar**

Tempat belajar dapat dilakukan di PKBM, SKB (NPTD) atau tempat lain yang layak digunakan sebagai tempat pembelajaran.

**g. Pembiayaan**

Dana penyelenggaraan program paket A bersumber dari dana Pemerintah

Daerah dan masyarakat termasuk swadaya warga belajar. Dana tersebut

## **1. Pengadaan sarana belajar**

- **Bahan belajar pokok**
- **Bahan belajar pelengkap**
- **Buku-buku administrasi kejar**
- **Ratio WB : modul 1 : 1 set**
- **Minimal ada dua jenis bahan belajar pelengkap**
- **Ada satu set buku-buku administrasi kejar : Buku induk, daftar hadir, WB/Tutor, inventaris dan daftar nilai**
- **Tersedia minimal satu pedoman Tutor**
- **Ada bahan atau alat praktek keterampilan satu set**
- **Prasarana belajar berupa kursi, meja dan papan tulis telah tersedia karena merupakan pinjaman dimana tempat belajar berlangsung.**

**Berdasarkan keterangan yang diperoleh dilapangan, indikator keberhasilan dan tersedianya sarana belajar yaitu :**

- **Terpenuhinya kebutuhan modul**
- **Ada bahan belajar pelengkap yang diterima oleh warga belajar minimal dua jenis**
- **Ada bahan atau alat praktek keterampilan minimal satu set**
- **Ada buku administrasi, buku induk, daftar hadir WB, Dan buku inventaris**



## 2. Pelatihan Tenaga Kependidikan (Tutor Penyelenggara)

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Dikluspora Kota Balikpapan diperoleh keterangan sebagai berikut<sup>36</sup>:

Untuk merekrut tenaga kependidikan (Tutor NST) terlebih dahulu diadakan penyeleksiaan administrasi calon tutor harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, kemudian mengisi formulir :

Nama, asal, pekerjaan, pendidikan, alamat, kemampuan pendidikan keguruan minimal SLTA.

- a. Pendidikan Keguruan minimal SLTA
- b. Berasal dari guru SD
- c. Dekat dengan lokasi kejar. Mampu melaksanakan Tutorial
- d. Satu kelompok WB, minimal satu orang Tutor.

Adapun jenis pelatihannya dibagi dalam dua program karena bahan kajian program paket A minimal terdiri dari dua yaitu bahan belajar pokok dan bahan belajar pelengkap.

- 1) Bahan belajar pokok terdiri dari:
  - a. PPKN
  - b. Bahasa Indonesia
  - c. IPS
  - d. Matematika

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Rifani, S.Pd, SH, M.Pd, Kasubag. PLS, tanggal 10 Juni 2008

**2) Bahan Belajar Pelengkap terdiri dari:**

- a. Pendidikan Kesegaran Jasmani**
- b. Keterampilan Fungsional Praktis.**

Pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan standar mutu para pengajar/Tutor karena pembelajaran program paket A bersifat fleksibel. Kebanyakan Tutornya berasal dari guru SD, maka waktunya disesuaikan dengan waktu luang bagi guru yang bersangkutan. Namun pelatihan ini masih sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana kemampuan guru menguasai bahan ajaran untuk warga belajar paket A. Pelatihan biasa dilaksanakan di DIKNAS Kota, pelatihannya kebanyakan diikuti oleh penilik sekolah.

**3) Pengadaan Dana Belajar**

- a. Dana berasal dari APBN dan dana APBN. Dana belajar ini digunakan untuk penyelenggaraan belajar setiap bulan/setiap kegiatan.**
- b. Honorium tenaga pelatih**
- c. Honorium tenaga penyelenggara**
- d. Dana operasional lainnya**

**4) Pengujian dan sertifikasi**

Pengujian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana daya serap warga belajar terhadap materi yang diberikan oleh Tutor berupa tugas mandiri, tugas kelompok dan test akhir model sertifikat dibelajarkan dan ditandatangani

**5) Monitoring dan evaluasi program**

- a. Penilik Dikluspora 2 kali dalam seminggu
- b. Kabid Dikluspora 1 kali dalam sebulan
- c. Kasi Dikluspora 2 kali dalam satu bulan
- d. Direktur Dikluspora 2 kali dalam 6 bulan

Sedangkan evaluasinya dilakukan oleh

- a. Penilik Dikluspora 1 kali dalam 1 bulan
- b. Kasi Dikluspora 1 kali dalam 2 bulan
- c. Bidang Dikluspora 1 kali dalam satu bulan
- d. Direktur Dikluspora 2 kali setahun

Bahan-bahan yang di evaluasi adalah:

- a. Ada tidaknya kegiatan belajar setiap hari
- b. Jumlah kegiatan belajar dan warga belajar
- c. Indikator keberhasilan dari program yang dijalankan.

**6) Penilaian Hasil Belajar dan Sertifikasi**

- Evaluasi tiga model penilaian meliputi:

Sertifikasi dibuat dalam bentuk ijazah diberikan kepada warga belajar yang telah menyelesaikan program-program dan berhasil lulus UAN, ijazah ditandatangani oleh Dinas Kabupaten/Kota. Dari pelaksanaan ini diharapkan warga belajar yang sudah dapat menyelesaikan program paket A dan lulus UAN berhak mendapat ijazah. Ijazah program paket A memiliki pengakuan yang sama dengan ijazah SD.

Konsekuensi pengakuan yang sama tersebut lulusan paket A berhak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama pula dengan lulusan SD. Pemerintah Daerah menekankan penguasaan kompetensi dasar bagi warga belajar baik akademik maupun keterampilan praktis pada dasarnya merupakan pembekalan bagi peningkatan status ekonomi, sehingga pada akhirnya lulusan paket A mampu melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. kondisi tersebut membantu percepatan pembangunan daerah tersebut.

**Tabel 3.13**

**JUMLAH PESERTA DIDIK PAKET A SETARA SD, JUMLAH TUTOR DAN KELOMPOK BELAJAR**

NO	KECAMATAN	PESERTA	TUTOR	KEJ A R
01	Balikpapan Selatan	275	14	8
02	Balikpapan Timur	53	4	2
03	Balikpapan Utara	33	4	2
04	Balikpapan Tengah	33	4	2
05	Balikpapan Barat	193	10	5
	Jumlah	587	36	19

## **2. Penyelenggaraan Program Paket B**

Penyelenggaraan paket B setara SLTP.

Program paket B setara SLTP merupakan program kesetaraan yang dilaksanakan jalur pendidikan luar sekolah. Program paket B bertujuan untuk membekali warga belajar dengan kemampuan pengetahuan setara dengan lulusan SLTP.

### **a. Warga Belajar**

Yang berhak mengikuti paket B adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Lulusan SD/MI/paket A setara SD yang dibuktikan ijazah paket.
2. Putus sekolah SLTP/MTs yang dibuktikan dengan surat keterangan/rapor dari sekolah asal.

### **b. Keterangan**

Penyelenggaraan paket B dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau lembaga, seperti PKBM, LSM atau lembaga kursus SKB/UPTD.

### **c. Syarat penyelenggara**

1. Memahami paket B setara SLTP
2. Memiliki prasarana gedung tempat belajar dan meja kursi yang memadai
3. Mampu mengorganisasikan tenaga kependidikan yang terlibat dalam proses pembelajaran paket B
4. Mampu mengelola penyelenggaraan pembelajaran program paket B
5. Memiliki izin penyelenggara paket B dari tingkat Kota

#### **d. Tenaga Tutor dan Nara Sumber Teknis (NTS)**

Dalam penyelenggaraan program paket B harus tersedia tenaga pendidik dalam proses Tutorial pada mata pelajaran yang sesuai dengan kurikulum paket B dan NST untuk material atau latihan keterampilan.

#### **Syarat Tutor dan NST:**

- 1. Memiliki ijazah minimal D2 jurusan pendidikan**
- 2. Menguasai substansi materi yang dibelajarkan**
- 3. Sehat jasmani dan rohani**
- 4. Menguasai teknik pembekalan partisipatif**
- 5. Mampu mengolah pembelajaran sesuai dengan bahan ujian yang diajarkan**
- 6. Memiliki kemitraan terhadap tugasnya sebagai Tutor/NST**
- 7. Khusus NST, memiliki kecakapan khusus yang dibutuhkan olehwarga belajar**
- 8. Telah mengikuti pelatihan Tutor paket B**

#### **e. Sarana Belajar**

Dalam penyelenggaraan program paket B perlu disediakan sarana belajar yang memadai. Sarana belajar yang dimaksud adalah:

- 1. Kurikulum inti dan kurikulum muatan lokal**
- 2. Buku pegangan Tutor dan NST**
- 3. Modul pelajaran paket B**
- 4. Buku/modul keterampilan**
- 5. Bahan dan peralatan untuk belajar keterampilan**
- 6. Sarana belajar penunjang lainnya yang diperlukan**

#### **f. Tempat Belajar**

Tempat belajar dapat dilakukan disekolah, SKB atau tempat lain yang layak digunakan sebagai tempat pembelajaran yang bisa dipakai sesuai dengan yang dibutuhkan.

#### **g. Pembiayaan**

Dana penyelenggaraan program paket B, bersumber dari Pemerintah Daerah dan masyarakat termasuk swadaya warga belajar yang dipertimbangkan komponennya.

#### **h. Penyajian dan Sertifikasi**

1. Test kemajuan hasil belajar minimal 1 bulan sekali
2. Jadwal semester menyesuaikan jadwal yang ditentukan Dikluspora

Sertifikat/ijazah dikeluarkan oleh Dinas DIKNAS dan nantinya bisa digunakan oleh warga belajar untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi.

#### **i. Monitoring dan evaluasi program**

Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan program-program yang telah dilaksanakan.

Monitoring dilakukan oleh:

1. Penilik Dikluspora 2 kali dalam 1 minggu
2. Kasi Dikluspora 1 kali dalam 1 bulan
3. Disdik dan Dikluspora 2 kali dalam 6 bulan

Para penyelenggara program paket B memiliki kesempatan dan diberikan peran seluas-luasnya untuk melakukan perubahan dan pembaharuan penyelenggaraan paket B untuk mencapai daya guna dan hasil guna.

**Tabel 3.14**

**JUMLAH PESERTA DIDIK PAKET B SETARA SMP, JUMLAH TUTOR  
DAN KELOMPOK BELAJAR**

NO	KECAMATAN	PESERTA	TUTOR	KEJAR
01	Balikpapan Selatan	450	50	10
02	Balikpapan Timur	209	36	6
03	Balikpapan Utara	89	18	3
04	Balikpapan Tengah	129	24	4
05	Balikpapan Barat	209	30	5
	Jumlah	1086	158	29

Sumber: Dinas Pendidikan Dasar Balikpapan